Ceramah Kebijakan Pengawasan Anggaran, 18 Januari 2021

BIMTEK

Penggunaan SAKTI

Di Sekretariat Jenderal DPR-RI

Drs. Setyanta Nugraha, SE, QGIA

Inspektur Utama

SAKTI, Sistem Aplikasi Tingkat Instansi adalah wujud penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara yang mengikuti best practice dunia internasional dimaksudkan untuk menjadi solusi yang komprehensif secara sistemik, khususnya bagi stakeholders dan khalayak yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan operasionalisasi SAKTI

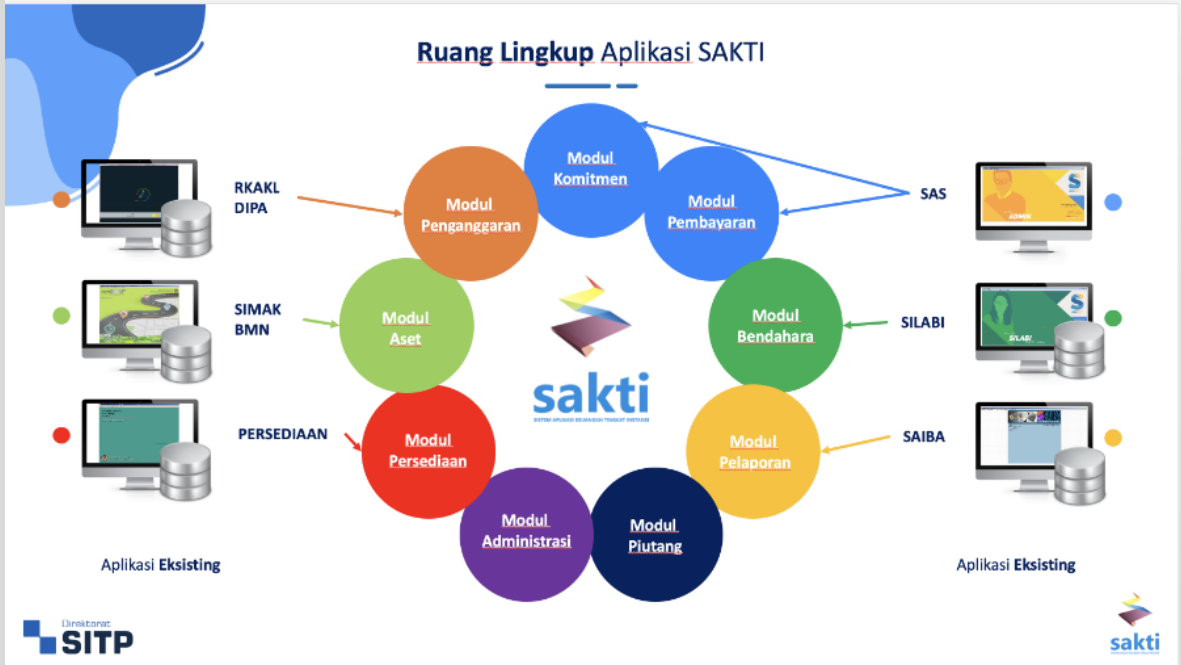

SAKTI merupakan bagian dari konsep Sistem Manajemen Keuangan Terpadu (*Integrated Financial Management Information System atau IFMIS*) yang menjadi tuntutan pengelolaan keuangan modern. Secara umum, IFMIS merupakan sebuah sistem informasi yang mencatat transaksi-transaksi finansial dan menghasilkan ikhtisar informasi keuangan.

IFMIS terdiri atas beberapa subsistem utama dari siklus pengelolaan keuangan negara mulai dari **perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga audit, evaluasi hasil, dan kinerja keuangan**. Penggunaan IFMIS identik dengan integrasi dan kecepatan yang sebagai hasilnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan salah satu intansi yang menjadi Pilot Project penerapan SAKTI, perlu menyusun produk hukum sebagai landasan, simplifikasi proses bisnis, penyiapan infrastruktur yang memadai, serta sumber daya manusia (SDM) yang handal. Perubahan aplikasi ini akan menuntut adanya ***change management***, tidak saja dari aplikasi yang digunakan saat ini, namun juga **mindset** dan ***perilaku*** dari para pengguna aplikasi tersebut

PENGAWASAN

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau *controlling*. Fungsi ini menjadi kesatuan sebagai fungsi manajemen. selain fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian dan fungsi pengarahan.

Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

- *On the Spot*
- Dokumen, Laporan

Pengawasan Intern dan Ekstern

- Inspektorat
- BPK-RI, BURT

Jenis Pengawasan

Pengawasan Preventif, Represif

- Pada Perencanaan
- Setelah selesai Pelaksanaan

KEBIJAKAN PENGAWASAN 2021

Penguatan Tata Kelola Pengawasan

1. Kapabilitas APIP-IACM Level 3+; 2. Mendorong Maturitas SPIP-Maturitas Manajemen Risiko Level 3; 3. implementasi Audit Berbasis Risiko, 4. Melaksanakan Inpres Pencegahan Korupsi (PPG-KPK) , 5. Revisi Persekjen ttg Pedoman Manajemen Risiko, 6. Optimalisasi Pengawasan dimasa Pandemi Covid-19

Pengawalan Kebijakan Strategis Setjen DPR-RI

1. Pendorong pelaksanaan program Setjen DPR RI; 2. Pengarah implementasi SPIP-Manajemen Risiko; 3. Pemberi peringatan dini terhadap kegiatan yang mengandung resiko; merekomendasikan pemberhentian kegiatan yang berpotensi menyimpang; 4. Mengawal efektifitas implementasi kebijakan Setjen terkait dengan keputusan DPR RI

Membangun Wilayah Bebas Korupsi

1. Pelaksanaan sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi; 2. Memperluas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN; 3. Pelaporan pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi; 4. Mengefektifkan Pengelolaan WBS; 5. Pelaporan pelaksanaan Benturan Kepentingan, 6. Pendampingan Unit ZI menuju WBK-WBBM

Penguatan Kompetensi SDM Ittama dan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko

1. Pelatihan Risk Based Audit, Manajemen Risiko, PBJ, 2. Pelatihan dan sertifikasi Teknik Audit Berbantuan Komputer ; 3. Pelatihan dan Sertifikasi QIA-QGIA; 4. Aktif dalam kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan *Focus Group Discussion* (FGD).; 5. Menjadi anggota asosiasi profesi nasional (AAIPI) dan internasional (IIA).; 6. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mendorong terwujudnya Good Governance

1. Mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang dan jasa. 3. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan. 4. Evaluasi SAKIP dan LKj (LAKIP). 5. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (BPK RI, BPKP dan Inspektorat Utama). 6. Penyelesaian TGR dan KN

KEGIATAN PENGAWASAN

REVIU

1. Reviu RKA DPR
2. Reviu LK DPR
3. Reviu Lelang Pra DIPA
4. Reviu Revisi Anggaran
5. Reviu Penghematan
6. Reviu LK BMN
7. Reviu RK BMN.
8. Reviu LK.
9. Reviu RKKL.
10. Reviu PBJ.
11. Reviu Anggaran Optimalisasi.
12. Reviu LKJ
13. Reviu PIPK

AUDIT

1. Audit Kinerja
2. Audit Keuangan
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu

PEMANTAUAN

1. Pemantauan TLHP BPK
2. Pemantauan TPKN
3. Pemantauan Hasil Pengawasan Intern
4. Pemantauan Disiplin Pegawai
5. Pemantauan Penghapusan Aset
6. Pengelolaan LHKASN
7. Pengelolaan LHKPN

PENGAWASAN LAINNYA

1. Pendampingan Auditi
2. Sosialisasi
3. Asistensi
4. Konsultansi.
5. Pengawal RB
6. Penegak Integritas
7. Workshop
8. PPM
9. Kajian

EVALUASI

1. Evaluasi SAKIP
2. Evaluasi Renstra.

IKU ITTAMA

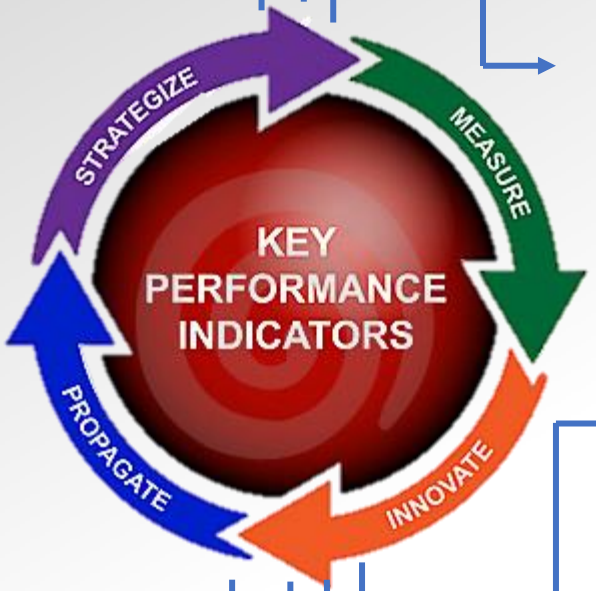

- Opini WTP : 12 Kali
- IACM : Level 3 DC
- Nilai RB : 75,81
- SPIP : Level 3
- Nilai SAKIP : 64.60
- Prosentase TLHP : 70 %
- Jumlah Unit Kerja ZI Berpredikat WBK : 2

INSPEKTORAT UTAMA

Dengan implementasi SAKTI, diharapkan proses pengelolaan keuangan negara mulai dari *proses penganggaran, proses pelaksanaan, dan pelaporan keuangan akan menjadi semakin mudah, efisien, dan transparan.*

Cukup dengan satu aplikasi yaitu SAKTI, stakeholders dapat melakukan seluruh transaksi keuangan yang dibutuhkan seperti *penyusunan dan revisi RKAKL/DIPA, pendaftaran supplier, mencatat transaksi bendahara, membuat SPM, mencatat data aset tetap dan persediaan, serta meng-hasilkan laporan keuangan periodik.*

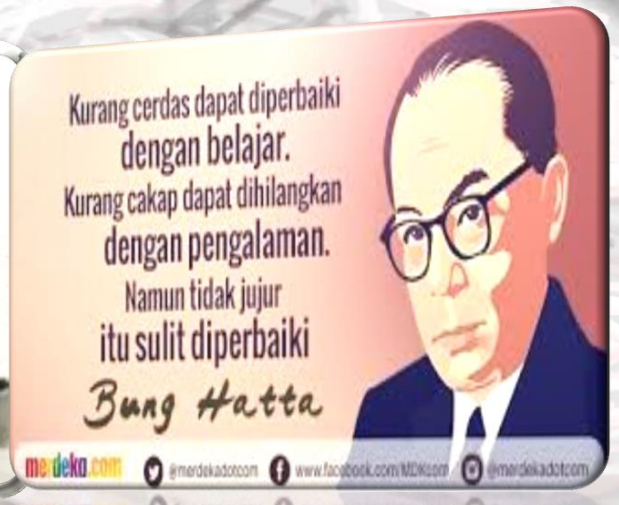

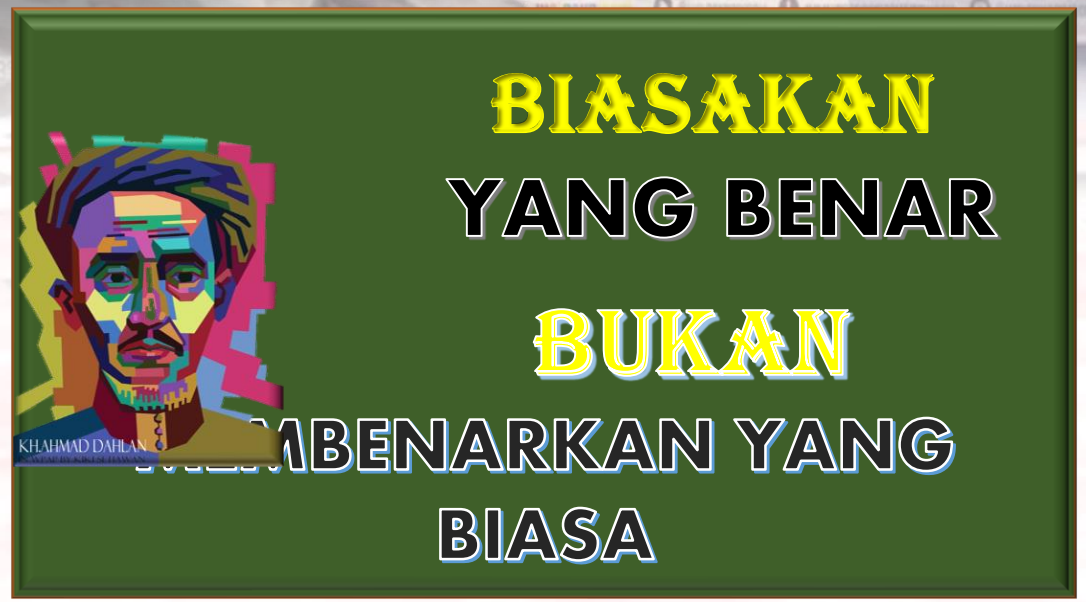

Selalu Sehat dan Produktif Dalam Situasi Pandemi Covid-19